

A tropical beach scene at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm glow over the water and sky. Palm trees and large rocks are visible along the shoreline. The overall atmosphere is serene and peaceful.

**PENGARAHAN BUPATI BANGKA
DALAM
RAPAT KOORDINASI SKPD**

PEMERINTAHAN UMUM

- DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN PENYERAPAN APBDDES, AGAR BPM PEMDES SEGERA MENYUSUN PERATURAN BUPATI SEBAGAI PEDOMAN MEKANISME PENYERAPAN APBDDES TERSEBUT, BERKORDINASI DENGAN DPPKAD DAN BAPPEDA
- AGAR BPM PEMDES SEGERA MENGINVENTARISIR DAN MENUNTASKAN PERSOALAN BATAS DESA. PEMBIAYANNYA DAPAT MELALUI APBDDES

- AGAR INSPEKTORAT DAN BAGIAN PEMERINTAHAN MENGUPAYAKAN PENINGKATAN KUALITAS LAKIP DAN LPPD (DARI PREDIKAT C KE B).
- KEPADA INSPEKTORAT AGAR SECARA RUTIN DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA SKPD.
- DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN OPINI WTP, AGAR SELURUH SKPD DIBAWAH KOORDINASI INSPEKTORAT DAN DPPKAD, SEGERA MENGOPTIMALKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

- SEGERA DILAKUKAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH DINAS PERINDAGKOP DAN UKM BERKOORDINASI DENGAN BAPPEDA.
- BADAN KETAHANAN PANGAN DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEGERA MEMPERSIAPKAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK OPTIMALISASI PROGRAM PUPUK DAN BBM BERSUBSIDI. IDENTIFIKASI POTENSI-2 PERMASALAHAN YANG MUNGKIN TIMBUL, BUAT ANALISIS RESIKONYA, LAKUKAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF SEKALIGUS MERANCANG MoU ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.
- DINAS PU AGAR SEGERA MELAKSANAKAN PENATAAN TERHADAP KAWASAN KUMUH YANG ADA DI KELURAHAN SUNGAILIAT.

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL UNTUK SEGERA MENGOPTIMALKAN PENERAPAN KONEKSI SIAK ONLINE KE SETIAP KECAMATAN DAN MERANCANG KEBIJAKAN PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN VALIDITAS DATA KEPENDUDUKAN.
- DI MULAINYA PENERAPAN e-KTP YANG MERUPAKAN PERWUJUDAN SINGLE IDENTITY NUMBER DAN SISTEM DATABASE KEPENDUDUKAN NASIONAL, PARA CAMAT DAN LURAH SEGERA MENGUPAYAKAN AGAR TIDAK ADA LAGI PENDUDUK WAJIB KTP YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN e-KTP.
- TEKANAN PEMBIAYAAN JKSS SEMAKIN TINGGI: CAMAT DAN DINKES SEGERA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH PERSUASIF KEPADA MASYARAKAT UNTUK MIGRASI JKSS KE JAMKESMAS. TIDAK BOLEH ADA LAGI PENDUDUK YANG MENDAPATKAN ASURANSI KESEHATAN GANDA (JKSS DAN JAMKESMAS)

- SELURUH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, BAIK YANG BERSIFAT MAKRO (DIKELUARKAN PEMKAB BANGKA) MAUPUN MIKRO (DIKELUARKAN SKPD), HARUS DALAM RANGKA PENCAPAIAN “BANGKA BERMARTABAT”. SELURUH KEPALA SKPD, SEBELUM MENGELUARKAN KEBIJAKAN, HARUS TERLEBIH DAHULU MENGANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN SKPD DENGAN VISI-MISI “BANGKA BERMARTABAT”
- UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN “BANGKA BERMARTABAT”, KITA SEMUA HARUS MENGUBAH MINDSET. TIDAK ADA DAERAH ATAU BAHKAN NEGARA DI DUNIA YANG BERHASIL MELAKUKAN TRANSFORMASI BESAR TANPA DIMULAI DENGAN PERUBAHAN CARA PANDANG TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN YANG KITA EMBAN.

PERENCANAAN

- SELURUH KEPALA SKPD UNTUK SEGERA MENYELESAIKAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD DAN RENJA SKPD DENGAN MENGACU PADA RPJMD 2013 – 2018 PALING LAMBAT MINGGU PERTAMA BULAN JANUARI 2014.
- PENYUSUNAN RENJA SKPD DISAMPING MEMUAT RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN JUGA HARUS MEMUAT RENCANA PEMBEBASAN LAHAN BAGI KEGIATAN-KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN LAHAN, MENGACU PADA UU NO 2 TAHUN 2012.
- SETELAH PENETAPAN RENJA SKPD, AGAR SKPD SEGERA MENENTUKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).

PERENCANAAN

- KEPALA BPM PEMDES DAN CAMAT AGAR DAPAT MEMASTIKAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANGDES DILAKSANAKAN TEPAT WAKTU DENGAN BERPEDOMAN PADA RPJMD 2013 – 2018. BERKORDINASI INTENSIF DENGAN BAPPEDA
- AGAR KEPALA BAPPEDA MELAKSANAKAN SUPERVISI TERHADAP PELAKSANAAN MUSRENBANG MULAI DARI TINGKAT DESA SAMPAI TINGKAT KABUPATEN.

PELAKSANAAN ANGGARAN

- DI INSTRUKSIKAN KEPADA SETIAP SKPD AGAR DALAM PELAKSANAAN APBD 2014 MEMPEDOMANI KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU.
- DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD 2014 AGAR DPPKAD DAN SELURUH SKPD SEGERA MENYELESAIKAN DPA-SKPD BESERTA DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN ANGGARAN LAINNYA. MEMBUAT DAN MEMATUHI TIME SCHEDULE

PELAKSANAAN ANGGARAN

- PERMASALAHAN LAMBANNYA PENYERAPAN ANGGARAN, TERUTAMA UNTUK PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN, MENUNJUKKAN ADANYA GEJALA HAMBATAN STRUKTURAL DALAM SIKLUS ANGGARAN TERUTAMA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA. UNTUK ITU DI INSTRUKSIKAN AGAR :
 - SEGERA MEMPERSIAPKAN RENCANA UMUM PENGADAAN UNTUK KEGIATAN-KEGIATAN BELANJA MODAL. (SELURUH SKPD)
 - SEGERA MENYUSUN JUKLAK/JUKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN MEMBENTUK KELOMPOK KERJA ULP SERTA MEMPERCEPAT PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA. (BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)
 - MENGOPTIMALKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH. (INSPEKTORAT)

PELAKSANAAN ANGGARAN

- BERKENAAN DENGAN PENDAPATAN DAERAH, AGAR DPPKAD DAN SKPD PEMUNGUT PENDAPATAN, LEBIH PROAKTIF DALAM UPAYA MENGKONVERSI POTENSI PENDAPATAN DAERAH MENJADI PENDAPATAN DAERAH.
- MENGIDENTIFIKASI POTENSI TERSEBUT DAN MEMBUAT REGULASI-NYA YANG MENGIKAT SEMUA PIHAK

- SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN BERSANGKUTAN AGAR DAPAT DIOPTIMALKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.
- DI INFORMASIKAN DAN DITEGASKAN KEMBALI BAHWA MEKANISME PENCAIRAN DANA DAK DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP.
- DIHARAPKAN KEPADA SELURUH SKPD TERKAIT UNTUK DAPAT MEMAHAMI PETUNJUK TEKNIS DANA DAK DAN MENJAMIN PELAKSANAAN DAK TAHUN 2014 LEBIH OPTIMAL.

- UNTUK CAMAT MENDO BARAT DAN CAMAT PUDING BESAR AGAR SEGERA BERKOORDINASI DENGAN BAPPEDA UNTUK MERANCANG PROGRAM DAN KEGIATAN BERKENAAN DENGAN PEMANFAATAN DANA QUICK WINS, 3 MILYAR PER KECAMATAN (PERCEPATAAN MP3KI).
- AGAR SELURUH CAMAT SEGERA MEMPERSIAPKAN PELAKSANAAN PNPM PISEW 2014 BERKOORDINASI DENGAN BAPPEDA DAN DINAS PU.

- UNTUK PROGRAM SATAM EMAS, AGAR DPPKAD SEGERA MELAKUKAN KOORDINASI SECARA INTENSIF KE PEMERINTAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG BERKENAAN DENGAN KEJELASAN MEKANISME PROGRAM SATAMAS.
- CAMAT SEGERA MEMPERSIAPKAN RKA-DPA SATAM EMAS SESUAI MENU YANG DITETAPKAN MELALUI PERGUB. BERKORDINASI INTENSIF DENGAN BAPPEDA

PENGUATAN KETERSEDIAAN DATA- DATA POKOK

- AGAR SETIAP SKPD TEKNIS BERKOORDINASI DENGAN BAPPEDA, SEGERA MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN DATA-DATA TEKNIS YANG BERKAITAN DENGAN DANA TRANSFER KEPADA SKPD PROVINSI MAUPUN KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT PALING LAMBAT AKHIR BULAN FEBRUARI 2014.
- KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP AGAR SEGERA MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN DATA-DATA LAHAN KRITIS KEPADA BAPPEDA.
- KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA UNTUK SEGERA MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN DATA-DATA TEKNIS TRANSPORTASI KE PULAU-PULAU TERPENCIL.
- AGAR SEGERA DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP DATA-DATA YANG TERTUANG DALAM PROFIL DESA PADA MASING-MASING DESA OLEH BPM PEMDES BERKOORDINASI DENGAN BAPPEDA.

PERIZINAN

- PENERBITAN SELURUH PERIZINAN HARUS BERDASARKAN PROSEDUR DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA MENGACU KEPADA RUTRW KABUPATEN BANGKA.
- PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENERBITAN PERIZINAN AGAR DIWUJUDKAN DALAM BENTUK PERSETUJUAN DARI MASYARAKAT SEKITAR LOKASI
- DIINSTRUKSIKAN KEPADA ASISTEN PEMBANGUNAN DAN KABAG HUKUM AGAR SEGERA DILAKUKAN INVENTARISIR DAN EVALUASI SECARA KOMPREHENSIF TERHADAP SELURUH PERIZINAN YANG TELAH DITERBITKAN BAIK YANG SUDAH BEROPERASI MAUPUN YANG BELUM BEROPERASI.

PENGUATAN REGULASI

- BAGIAN HUKUM SEGERA MENGINVENTARISIR KEBIJAKAN-2 PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG BELUM MEMILIKI PAYUNG HUKUM YANG KUAT ATAU DISKRESI DAN SEGERA MENETAPKAN REGULASI-NYA, BAIK DALAM BENTUK PERATURAN BUPATI MAUPUN PERDA. MELAPORKAN HASILNYA KEPADA BUPATI/SEKDA PALING LAMBAT FEBRUARI 2014. SEGERA MASUKKAN DALAM PROLEGDA 2104 UNTUK DIBAHAS BERSAMA DPRD
- BADAN KETAHANAN PANGAN SEGERA MENYELESAIKAN RAPERDA LAHAN PERTANIAN, PEMBERDAYAAN PETANI DAN PERLINDUNGAN PETANI. PALING LAMBAT FEBRUARI 2014, MELAPORKAN HASILNYA KEPADA BUPATI/SEKDA. SEGERA MASUKKAN DALAM PROLEGDA 2104 UNTUK DIBAHAS BERSAMA DPRD.
- UNTUK PERCEPATAN PENINGKATAN IPM, DINAS PENDIDIKAN SEGERA MENYELESAIKAN RAPERDA TENTANG PENJARINGAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN PENGENTASAN BUTA AKSARA, PALING LAMBAT FEBRUARI 2014, MELAPORKAN HASILNYA KEPADA BUPATI/SEKDA. SEGERA MASUKKAN DALAM PROLEGDA 2104 UNTUK DIBAHAS BERSAMA DPRD.

- UNTUK PERCEPATAN PENINGKATAN IPM, DINAS KESEHATAN SEGERA MENYELESAIKAN RAPERDA TENTANG PENURUNAN KEMATIAN BAYI, ANAK DAN IBU MELAHIRKAN, PALING LAMBAT FEBRUARI 2014, MELAPORKAN HASILNYA KEPADA BUPATI/SEKDA. SEGERA MASUKKAN DALAM PROLEGDA 2104 UNTUK DIBAHAS BERSAMA DPRD
- KEPALA BPM PEMDES AGAR SEGERA MENYUSUN DAN MENYELESAIKAN PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS ADD PALING LAMBAT AKHIR BULAN JANUARI 2014 BERKOORDINASI DENGAN DPPKAD DAN BAPPEDA.
- KEWENANGAN DAERAH YANG DISERAHKAN KEPADA DESA YANG DAPAT DIBIYAI OLEH ADD SEPERTI PEMELIHARAAN ASET PNPM PISEW, AGAR DIATUR DALAM JUKLAK/JUKNIS DIMAKSUD.

- SELURUH KEPALA SKPD BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PERUBAHAN MINDSET BAWAHANNYA. MULAI SAAT INI, KITA SEMUA HARUS BERKOMITMEN DAN MEMANDANG BAHWA: (A) KERJA ADALAH RAHMAT, OLEH KARENA ITU KITA BEKERJA TULUS PENUH SYUKUR; (B) KERJA ADALAH AMANAH, OLEH KARENA ITU KITA BEKERJA BENAR PENUH TANGGUNG JAWAB; (C) KERJA ADALAH PANGGILAN. OLEH KARENA ITU KITA BEKERJA TUNTAS PENUH INTEGRITAS; (D) KERJA ADALAH AKTUALISASI, OLEH KARENA ITU KITA BEKERJA KERAS PENUH SEMANGAT; (E) KERJA ADALAH IBADAH, OLEH KARENA ITU KITA BEKERJA SERIUS PENUH KECINTAAN; (F) KERJA ADALAH SENI, OLEH KARENA ITU KITA BEKERJA CERDAS PENUH KREATIVITAS; (G) KERJA ADALAH KEHORMATAN, OLEH KARENA ITU KITA BEKERJA TEKUN PENUH KEUNGGULAN; (H) KERJA ADALAH PELAYANAN, OLEH KARENA ITU KITA BEKERJA SEMPURNA.
- UNTUK INTERNALISASI MINDSET INI, SELURUH SKPD WAJIB MEMBUAT BANNER TERKAIT KERJA INI DAN DIPASANG DI SELURUH RUANG KANTOR SKPD, PALING LAMBAT AKHIR JANUARI 2014. INSPEKTORAT MELAPORKAN PERKEMBANGANNYA KEPADA BUPATI



SEKIAN DAN TERIMA KASIH